

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Ideologi merupakan suatu gagasan tentang masa depan sekaligus gagasan tentang cita-cita. Istilah ideologi ini dikemukakan oleh filsuf Perancis yang bernama Destutt deTracy (1754-1836) dan muncul sekitar akhir abad ke-18<sup>1</sup>. Ideologi dapat dimaknai kedalam dua pengertian yakni sebagai cita-cita dan sebagai masa depan. Ideologi bukan hanya sekedar gagasan, namun ideologi adalah sebuah gagasan yang dianut oleh sekelompok manusia ataupun oleh bangsa dari suatu Negara. Ideologi merupakan alat yang menggerakkan seseorang atau sekelompok orang guna mencapai cita-citanya. Terlepas dari ideologi tersebut hanya sebuah mimpi atau utopia namun penekanannya adalah ideologi merupakan gagasan ilmiah rasional yang bertolak dari analisis masa kini. Gagasan seseorang yang membentuk ideologi tentunya telah memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang nantinya akan terjadi di masa depan, namun gagasan mengenai suatu ideologi bukan hanya berpatok pada orientasi mendatang, tetapi melihat realitas yang terjadi pada saat ideologi terbentuk.

Salah satu pemikiran seseorang yang menjelma menjadi sebuah ideologi adalah pemikiran dari Sukarno. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada ideologi

---

<sup>1</sup> Menurut Franz Magnis Suseno, 1992 dalam buku karangan Yulianto Sigit Wibowo, *Marhaenisme Ideologi Perjuangan Sukarno* (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2005), hlm. 56.

hasil pemikiran Sukarno yang menjadi penggerak bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita masa depannya, yakni Marhaenisme.

Sebagai sebuah dasar gerakan politik yang memuat konsep masyarakat yang dikehendaki, maka marhaenisme sudah memenuhi syarat untuk disamakan dengan sebuah ideologi. Sebagai ideologi, maka marhaenisme tidak akan terlepas dari kecenderungan-kecenderungan ideologi lain yang lebih dulu ada. Marhaenisme sebagai ideologi yang progresif merupakan sebuah *counter* ideologi terhadap ideologi reaksioner yang direpresentasikan oleh imperialisme Belanda di Indonesia. Cita-cita marhaenisme bukan hanya sekedar untuk mengusir penjajah Belanda, tetapi yang lebih penting lagi adalah marhaenisme berjuang untuk kesejahteraan rakyat khususnya kaum marhaen Indonesia. Marhaenisme juga berusaha meniadakan sistem yang menindas kaum marhaen itu sendiri contohnya adalah sistem kapitalisme, baik kapitalisme asing maupun kapitalisme bangsa sendiri. Cita-cita ini didasarkan pada kepercayaan marhaenisme, bahwa kapitalisme adalah penyebab kesengsaraan, kemiskinan, peperangan dan rusaknya susunan dunia<sup>2</sup>.

Marhaenisme bertitik tolak dari nasionalisme yang bersifat khas Indonesia yakni sosio-nasionalisme yang dikaitkan dengan perikemanusiaan, dimaksudkan untuk menghindari penindasan antar bangsa dan penindasan di dalam bangsa. Sosio-nasionalisme tersebut mendorong sosio-demokrasi yakni demokratisasi yang berkaitan dengan usaha penegakan keadilan sosial<sup>3</sup>. Singkatnya marhaenisme

---

<sup>2</sup> Yulianto Sigit Wibowo, *Marhaenisme Ideologi Perjuangan Sukarno* (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2005), hlm.61

<sup>3</sup> Retor A.W. Kaligis, *Marhaen dan Wong Cilik : Membedah Wacana dan Praktik Nasionalisme bagi Rakyat Kecil dari PNI sampai PDI Perjuangan*, (Tangerang : Margin Kiri, 2014), hlm 312

merupakan cara perjuangan kaum nasionalis untuk membebaskan kaum marhaen dari sistem yang menindasnya. Marhaen sendiri adalah kaum buruh Indonesia, kaum tani Indonesia yang *melarat* dan kaum *melarat* Indonesia yang lainnya. Sedangkan tiap-tiap orang Indonesia yang menjalankan marhaenisme disebut marhaenis<sup>4</sup>.

Marhaenisme disyaratkan menjadi pembebas dan penebus segala kesengsaraan rakyat yang diakibatkan oleh kapitalisme, baik dari bangsa asing maupun bangsa sendiri. Karenanya marhaenisme secara materiil harus mampu menjembatani kesenjangan yang terjadi antara realitas sosial dengan kesadaran aktual massa serta menjelaskan kondisi sosial masyarakat secara historis. Sebab jika hal tersebut tidak dapat dilakukan maka marhaenisme akan terjebak menjadi suatu pemahaman yang tidak ilmiah, sekedar kesadaran palsu dan tidak tertutup kemungkinan menjadi klaim-klaim pembenar kekuasaan.

Segi historis memperlihatkan bahwa ikhtisar marhaenisme telah ada sebagai penggerak dalam dinamika Pergerakan Nasional. Salah satu bagian pergerakan nasional tersebut adalah organisasi partai politik, salah satunya adalah PNI era 1927 yang didirikan Sukarno. Saat itu PNI 1927 belum menganut asas marhaenisme, melainkan kemerdekaan, persatuan dan solidaritas Indonesia, non-kooperasi serta *self-help*, karena marhaenisme baru pertama kali dinyatakan secara tertulis pada tahun 1930. Namun asas yang dipakai PNI 1927 pada intinya tidak berbeda dengan marhaenisme dan asas tersebut merupakan komponen pendukung lahirnya

---

<sup>4</sup> Sukarno, *Di bawah Bendera Revolusi* (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005), hlm. 253

marhaenisme. Konstelasi politik yang ada sekitar tahun 1930-1931 menghadirkan realita bahwa PNI pada saat itu lesu seiring dengan vonis yang dijatuhkan pengadilan kolonial Bandung pada Sukarno. Ia dijerat pasal 169 Kitab hukum Pidana Kolonial yang berbunyi “*barang siapa ikut dengan perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun, dan barang siapa ikut dengan suatu perkumpulan yang bermaksud melakukan pelanggaran atau dengan perkumpulan lain yang dilarang peraturan umum, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan.*”<sup>5</sup> Seiring dengan vonis tersebut, akhirnya pada tanggal 25 April 1931 PNI dinyatakan bubar.

Bubarinya PNI era 1927 tidak mematikan pergerakan nasional yang ada, organisasi partai politik dengan semangat persatuan didirikan kembali pada 29 April 1931 dengan nama Partai Indonesia (Partindo). Asas Partindo adalah menentukan nasib sendiri, persatuan Indonesia, kerakyatan dan kebangsaan. Partindo juga membawa rumusan tentang marhaen dan proletar yang disampaikan pada kongresnya di Mataram tahun 1930’an. Isi dari putusan dalam kongres tersebut adalah sebagai berikut<sup>6</sup> :

1. Marhaenisme yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.
2. Marhaen, yaitu kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat dan kaum melarat Indonesia yang lainnya.

---

<sup>5</sup> Daradjati. *Mr.Sartono : Pejuang Demokrasi dan Bapak Parlemen Indonesia*. (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2014). Hlm: 2

<sup>6</sup> Ir. Sukarno. *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1*. (Yogyakarta : Media Press Indo dan Yayasan Bung Karno. 2015) hlm. 285-286

3. Partindo memakai perkataan marhaen, dan tidak proletar, karena perkataan proletar sudah termaktub dalam perkataan marhaen dan oleh karena perkataan proletar itu bisa juga diartikan bahwa kaum tani dan lain-lain kaum yang melarat tidak termaktub di dalamnya.
4. Karena Partindo berkeyakinan bahwa di dalam perjuangan kaum melarat Indonesia lain-lain itu yang harus menjadi elemen-elemenya, maka Partindo memakai perkataan marhaen itu.
5. Di dalam perjuangan marhaen itu maka Partindo berkeyakinan bahwa kaum proletar mengambil bagian yang besar sekali.
6. Marhaenisme adalah asas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri yang di dalam segala halnya menyelamatkan marhaen.
7. Marhaenisme adalah cara perjuangan untuk mencapai susunan masyarakat dan susunan negeri yang demikian itu, yang oleh karenanya harus suatu cara perjuangan yang revolusioner.
8. Jadi marhaenisme adalah cara perjuangan dan asas yang menghendaki hilangnya tiap-tiap kapitalisme dan imperialisme.
9. Marhaenis adalah tiap-tiap orang bangsa Indonesia yang menjalankan marhaenisme.

Pada 1936 Partindo dianggap sudah kurang sesuai dengan perkembangan zaman karena semata-mata melakukan konfrontasi kepada pemerintah Belanda tanpa memperhitungkan bahwa Negara jajahan tersebut sedang berhadapan melawan fasisme yang merupakan musuh bersama.

Partindo menorehkan putusan besar yang berguna bagi bangsa Indonesia dalam menentukan langkah geraknya, yakni tentang Marhaenisme. Marhaenisme kemudian menjadi suatu ideologi penggerak yang diyakini oleh sekelompok orang yang mengakomidir dirinya dalam suatu organisasi partai politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan marhaenisme dijadikan sebagai alat gerak partai tersebut.

Pasca kemerdekaan Indonesia, partai politik yang menggunakan marhaenisme sebagai asasnya adalah PNI yang didirikan pada tahun 1946, meskipun Sukarno sebagai penggagas marhaenisme tidak terlibat dalam PNI era 1946 namun partai tersebut menjadikan marhaenisme sebagai asas yang dipegang karena dinilai sebagai alat perjuangan yang paling baik untuk mengedepankan kesejahteraan kaum marhaen Indonesia.

Dalam era ordebaru, terdapat fusi partai tahun 1973 yang menjadikan PNI, MURBA, IPKI, Parkindo dan Partai Katolik bergabung dalam satu partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Langkah PDI yang kembali mengangkat marhaenisme sebagai asas nampaknya tidak lancar, konstelasi politik orde baru memaksa istilah marhaenisme tidak dipakai dalam partai tersebut dan de-Sukarnoisasi semakin gencar dilakukan. Namun kalangan PNI cukup cerdas dalam mensiasati bagaimana sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dari marhaenisme bisa mereka transformasi ke dalam istilah lain untuk bisa menjadi tiga watak dan ciri PDI, yaitu demokrasi Indonesia, kebangsaan Indonesia dan keadilan sosial. PDI juga dalam menunjukkan identitas keberpihakannya terhadap kaum marhaen menggunakan istilah *wong cilik* sebagai pengganti kata marhaen, hal ini yang

menjadikan PDI sering disebut sebagai “partainya *wong cilik*”. Berbagai macam konflik internal partai PDI terjadi sampai pada akhirnya pasca orde baru PDI bertransformasi menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). PDI-P sebagai kelanjutan PDI meneruskan tiga watak dan ciri partai yakni demokrasi Indonesia, kebangsaan Indonesia dan keadilan sosial. Perubahan istilah marhaen menjadi istilah *wong cilik* juga dilanjutkan oleh PDI-P <sup>7</sup>.

Aspek sejarah memperlihatkan bahwa PDI-P yang menjadikan marhaenisme sebagai dasar perjuangan tidak bisa terlepas dari aspek sejarah tiga partai sebelumnya, partai-partai tersebut terangkum dalam tabel di bawah ini.

---

<sup>7</sup> Retor A.W. Kaligis, Op.Cit, 3

Tabel 1.1

## Partai Politik dengan Nilai Marhaenisme sebagai Dasar Perjuangan

No.	Nama Partai	Asas
1.	PNI era 1927 – 1931	Kemerdekaan, persatuan dan solidaritas Indonesia, non-kooperasi serta <i>self-help</i> .
2.	PNI era 1946 – 1973	Marhaenisme dengan prinsip sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi
3.	PDI 1973 – 1998	Asas PDI adalah Pancasila, watak dan ciri partai adalah demokrasi Indonesia, Kebangsaan Indonesia dan keadilan sosial sebagai Bahasa lain sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dari PNI
4.	PDI-P 1998 – sekarang,	PDI-P meneruskan asas, watak dan ciri partai dari PDI yakni Pancasila 1 Juni 1945 sebagai asas, demokrasi Indonesia, Kebangsaan Indonesia dan keadilan sosial sebagai watak dan ciri partai

PDI-P memahami partai sebagai alat perjuangan untuk membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Partai juga sebagai alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi (TRI SILA), serta alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (EKA SILA). Selain itu PDI-P merupakan wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warganegara dengan cara membumikan ajaran-ajaran Sukarno sebagai teori



perjuangan sekaligus tujuan perjuangan politik. Asas partai PDI-P itu sendiri adalah Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya 1 Juni 1945. Jatidiri partai adalah Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan sosial serta watak partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner<sup>8</sup>. PDI-P masih memakai ajaran Sukarno tentang marhaenisme sebagai dasar dari semangat perjuangannya yang tertuang dalam asas, jatidiri serta watak partai.

Keyakinan dan identitas tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam dokumen resmi sikap dan kebijakan partai yang menyatakan bahwa PDI-P menyakini bahwa Nasionalisme PDI-P adalah nasionalisme berwatak kerakyatan dan kemanusiaan. Nasionalisme kerakyatan yang digunakan PDI-P adalah nasionalisme Sukarno atau Marhaenisme seperti yang terdapat didalam sikap dan kebijakan PDI-P yang mengatakan bahwa PDI-P memiliki kewajiban sejarah, ideologis dan politis untuk memulihkan nasionalisme kerakyatan (sosio nasionalisme) sebagaimana yang digagas oleh Sukarno agar bisa hidup kembali sebagai bagian utuh dari seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia.

Ajaran Sukarno tentang marhaenisme memiliki posisi yang mendasar sebagai dasar perjuangan PDI-P. Inti marhaenisme mengalir dalam nafas gerak PDI-P untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang dikenal dengan Trisakti Bung Karno. Asas partai yang digunakan yakni Pancasila 1 Juni 1945 yang bercirikan kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial (sosio nasionalisme – sosio

---

<sup>8</sup> AD/ART Partai PDI Perjuangan 2015-2020

demokrasi : Marhaenisme) serta berpegang teguh pada prinsip berdaulat di bidang politik, berkari bidang ekonomi dan berkepribadian di dalam berbudaya (Trisakti).

Permasalahan terkait ideologi partai politik yang sering terjadi adalah seringkali ideologi tersebut tidak dijadikan pedoman dalam pembuatan kebijakan. Ideologi masih dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya abstrak. Akibatnya kebijakan internal maupun eksternal partai sering bersifat normatif dan bukan penurunan dari nilai-nilai ideologi. Terlebih jika melihat Indonesia sebagai negara dengan sistem multipartai, dimana dalam sistem multi partai, suara partai politik yang didapat di parlemen sulit memenuhi angka 50%+1. Akibatnya partai membutuhkan koalisi dalam parlemen guna memperkuat kedudukan apakah menjadi partai pendukung pemerintah atau partai oposisi. Namun koalisi yang terbentuk memperlihatkan bahwa partai politik dengan ideologi nasionalis berkoalisi dengan partai politik yang berideologi islamis, bahkan tanpa ragu berkoalisi dengan partai politik yang tidak memiliki ideologi sekalipun. Fenomena ini merupakan gambaran tentang hilangnya batas ideologi dalam peta koalisi partai politik.

Permasalahan lain mengenai ideologi partai adalah menyangkut lemahnya fungsi ideologi dalam kerja partai. Fungsi ideologi sebagai penarik basis masa atau dalam sistem perwakilan dikenal sebagai jembatan antara wakil dan konstituennya tidak optimal. Ideologi politik dituntut untuk menyesuaikan diri terhadap setiap perkembangan zaman, hal tersebut berkaitan dengan materialisasi ideologi. Konteks ruang dan waktu yang kurang diperhatikan dalam upaya

mematerialisasikan ideologi membuat langkah yang ditempuh partai politik sering bias dalam tujuan dan tidak tepat sasaran.

Penelitian ini akan melihat orientasi ideologi marhaenisme DPD PDI-P Jawa Tengah dalam menjalankan roda organisasi partai. Pemilihan Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi penelitian adalah karena Provinsi Jawa Tengah dijuluki sebagai *Kandang Banteng* lantaran PDI-P merupakan partai yang memiliki banyak pendukung didalamnya. Besarnya dukungan ini terlihat dari hasil tiga kali pelaksanaan Pemilu langsung yakni tahun 2004, 2009 dan 2014 dimana PDI-P Jawa Tengah selalu memperoleh kursi terbanyak di parlemen Jawa Tengah. Selain itu, dapat pula dilihat dari perolehan kursi secara nasional, dimana Jawa Tengah merupakan provinsi dengan perolehan suara PDI-P terbanyak di Indonesia.

PDI-P sebagai partai Sukarnoisme memiliki tugas sejarah memperjuangkan penegakan keadilan sosial ke arah kerja-kerja konkret untuk senantiasa merevitalisasi dan mereaktualisasi marhaenisme sebagai ideologi integratif dan transformatif, hal tersebut dapat dilihat melalui kerja-kerja kongkret kader maupun anggota partai. Jawa Tengah dengan julukan *kandang banteng* sebagai satu provinsi yang dapat menggambarkan tentang pelaksanaan penerapan ideologi PDI-P yang mengusung marhaenisme sebagai dasar perjuangan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah?
2. Apakah Kader dan Anggota DPD PDI-P Jawa Tengah Sudah Memahami Marhaenisme sebagai Dasar Perjuangan?
3. Apa Hambatan dalam Penerapan Marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian yang berjudul “Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme DPD PDI-P Provinsi Jawa Tengah” adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah.
2. Mengetahui pemahaman kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan.
3. Mengetahui hambatan penerapan marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini meliputi dua hal, yakni manfaat teoritik dan manfaat praktis.

Manfaat Teoritik

1. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan studi Ilmu Pemerintahan yakni tentang topik ideologi dan partai politik, guna tercapainya pemahaman tentang orientasi ideologi yang dianut oleh partai politik.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan orientasi ideologi, khususnya ideologi marhaenisme di PDI-P.

#### Manfaat Praktis

1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara umum tentang orientasi ideologi marhaenisme PDI-P, khususnya di DPD PDI-P Jawa Tengah.
2. Sebagai input atau bahan masukan bagi partai politik khususnya PDI-P dalam pembumih ajaran marhaenisme terhadap kadernya.

## **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang ditampilkan pada bagian ini digunakan sebagai referensi untuk membandingkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain. Hal yang harus diperhatikan dalam penelitian sebelumnya meliputi konsep yang digunakan, metode penelitian dan hasil penelitian.

Ahmad Hasyemi Multizami (2016), melakukan kajian mengenai marhaenisme dengan meninjau persepsi organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional

Indonesia (GMNI) terhadap marhaenisme sebagai ideologi perjuangan. Judul penelitian tersebut adalah : Persepsi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Semarang Terhadap Marhaenisme Sebagai Ideologi Perjuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisa data kuantitatif. Di dalamnya penulis berusaha menggambarkan keadaan faktual dan akurat tentang persepsi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Semarang terhadap Marhaenisme sebagai ideologi perjuangan. Hasil penelitian tersebut secara garis besar menjelaskan bahwa anggota GMNI cabang Semarang tetap setia memegang teguh ajaran Sukarno yaitu Marhaenisme sebagai ideologi perjuangan bagi GMNI, dan tetap optimis bahwa marhaenisme sebagai ideologi perjuangan mampu menjawab tantangan zaman untuk mewujudkan sosialisme Indonesia.

Ardila Fitriani dan Sri Budi Eko Wardani (2013), melakukan penelitian dengan judul : Fungsi Ideologi dalam Partai Politik, Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Perumusan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tahun 2010-2011. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan agar ditemukanya fakta-fakta mendalam saat melakukan penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan alasan bahwasanya penelitian tersebut hanya dalam batas menggambarkan fungsi ideologi dalam kebijakan dan sikap partai politik. Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan bahwa UU BPJS adalah manifestasi nilai keadilan sosial dan gotong royong dari ideologi Pancasila PDI-P. Selain ideologi, landasan perjuangan PDI-P dalam UU BPJS adalah Dasa Prasetiya partai sebagai ideologi kerja partai dan

perintah rakornas III di Bali. Pembuktian adanya fungsi ideologi dalam perumusan UU ini terlihat dari usulan pasal dan perdebatan pasal yang mengandung nilai ideologi partai. Selain itu, terdapat kekuatan ekstra parlementer yaitu Komite Aksi Jaminan Sosial yang mendorong disahkannya UU BPJS. Temuan dalam penelitian membuktikan bahwa PDI-P merupakan partai ideologis. Hal ini karena ideologi mempengaruhi strategi pemikiran aktor-aktor partai ini dalam perumusan UU BPJS.

### **1.5.2 Orientasi Ideologi**

Orientasi merupakan pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan. Orientasi ideologi merupakan kecenderungan seseorang terhadap suatu ideologi tertentu. Orientasi dapat terbentuk melalui adanya proses sosialisasi politik, yang mana sosialisasi politik sendiri berlangsung seumur hidup. Sehingga, orientasi ideologi maupun orientasi politik masing-masing masyarakat dapat berbeda seiring dengan perbedaan pola sosialisasi politik yang mereka alami. Dengan kata lain, akibat proses sosialisasi politik yang berbeda-beda, mengakibatkan orientasi ideologi maupun orientasi politik suatu masyarakat memiliki suatu ciri khas yang mungkin berbeda dengan masyarakat lainnya.

Untuk dapat memahami petunjuk yang relevan mengenai orientasi seseorang terhadap kehidupan politik termasuk di dalamnya tentang orientasi ideologi, haruslah dikumpulkan berbagai informasi yang meliputi pengetahuan, keterlibatan, dan penilaian seseorang terhadap salah satu obyek pokok orientasi

politik. Berdasarkan ketiga keterangan tersebut, maka dapat diperinci orientasi politik ke dalam 3 (tiga) tipe, yaitu<sup>9</sup>:

1. Orientasi Kognitif, yaitu pengetahuan dan kepercayaan terhadap objek-objek politik yang ada di sekitarnya. Individu dalam komunitas sosial hanya sekedar mengenal simbol-simbol politik, pengetahuan mendasar tentang kepercayaan politik, peranan-peranan politik, pemegang peranan politik tersebut dan segala kewajibannya serta input-input dalam sistem politik dan outputnya. Individu memiliki pengetahuan mengenai bagaimana sistem politik bekerja, tokoh-tokoh politik yang memiliki peranan kuat, masalah-masalah politik, kebijakan terkini, dan sebagainya.
2. Orientasi Afektif, yaitu berbicara mengenai perasaan dan kedekatan individu terhadap suatu sistem politik. Dalam bersikap politik, individu memiliki perasaan mendalam terhadap sistem politik, peranannya, dan aktor politiknya. Apabila individu tersebut memilih simbol parpol sebagai sesuatu yang pasti dan disebabkan oleh pengetahuannya akan simbol-simbol tersebut, maka individu tersebut menggunakan orientasi afektif. Orientasi afektif memiliki intensitas dan loyalitas yang berbeda yang disebabkan oleh dinamika psikologis individu, seperti kemarahan, rasa benci, rasa bangga, senang maupun frustrasi. Perasaan kecewa akibat tersingkirkan ataupun mengalami penolakan terhadap sistem politik yang ada dapat mengakibatkan individu enggan menanggapi sistem politik yang

---

<sup>9</sup> Gabriel A Almond dan Sidney Verba. 1984. *BUDAYA POLITIK: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Terj. Drs. Sahat Simamora. (Bumi Aksara: Jakarta) hlm. 16



ada. Demikian pula sebaliknya, pengalaman yang menyenangkan akan mengakibatkan individu terlibat dalam sistem politik yang ada.

3. Orientasi Evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Individu memahami betul program dan perjuangan partai. Ia juga simpatik dengan ketokohan simbolik partai, yang dengan demikian menyebabkan terlihat aktif dalam perjuangan program partai.

### **1.5.3 Ideologi**

Istilah ideologi dipergunakan dalam arti yang bermacam-macam. Ideologi adalah sebuah kata yang terdiri dari “ideo” dan “logi”. Kata “ideo” berasal dari bahasa Yunani yakni *eidos*, dalam bahasa Latin *idea* yang berarti pengertian, ide atau gagasan. Dalam bahasa Jawa dijumpai kata “idep” yang artinya tahu atau melihat, dan kata “logi” dalam bahasa Yunani artinya gagasan, pengertian, kata dan ilmu. Jadi secara epistemologis diterangkan bahwa ideologi merupakan pengetahuan tentang ide (*science of ideas*). Ideologi ini merupakan istilah yang lahir pada abad ke-18, pertama kali diperkenalkan oleh Destutt de Tracy (1754-1836) yang mendefinisikan ideologi sebagai ilmu tentang ide. Ilmu pengetahuan ini mempunyai garapan pada upaya penetapan asal mulanya ide-ide, dalam hal ini ilmu pengetahuan tersebut harus mengesampingkan prasangka-prasangka metafisika dan agama. Kemajuan ilmiah hanya dapat dicapai jika ide-ide palsu dapat dihindari. Sampai tingkat ini teori Bacon tentang elemen-elemen yang tidak rasional yang

menjadi penghalang dalam pengembangan ilmu pengetahuan seperti yang ditulisnya dalam *Novum Organum* (1620) dan khususnya perjuangan *Cindillac* melawan prasangka, mempunyai pengaruh yang pasti terhadap ilmu pengetahuan de Tracy tentang ide-ide. Demikianlah konsepsi awal ide-ide Destutt de Tracy yang mendudukan ideologi sekedar sebagai ilmu pengetahuan<sup>10</sup>.

Ideologi bukan hanya sekedar gagasan, melainkan gagasan yang diikuti dan dianut sekelompok manusia maupun bangsa, sehingga ideologi bersifat menggerakkan manusia untuk merealisasikan gagasan tersebut. Meskipun gagasan seseorang, betapapun ilmiah, rasional atau luhurnya, belum bisa disebut ideologi apabila belum dianut oleh banyak orang dan diperjuangkan serta diwujudkan dengan aksi-aksi yang berkesinambungan. Ideologi memiliki fungsi menanamkan keyakinan atau kebenaran perjuangan kelompok atau kesatuan yang berpegang teguh pada ideologi itu sendiri. Maka ideologi merupakan sumber inspirasi dan sumber cita-cita hidup bagi para penganutnya. Ideologi sebagai pedoman artinya menjadi pola dan norma hidup tetapi sekaligus menjadi ideal atau cita-cita. Dengan melaksanakan ideologi manusia tidak hanya sekedar melakukan apa yang disadari sebagai kewajiban, tetapi dengan ideologi pula manusia mengejar keluhuran. Oleh karena itu, manusia sanggup mengorbankan harta benda bahkan hidupnya demi ideologi, karena ideologi menjadi pola, norma hidup dan dikejar pelaksanaannya sebagai cita-cita maka tidak mengherankan jika ideologi menjadi bentuk hidup.

---

<sup>10</sup> Wibowo S Yulianto. 2005. *Marhaenisme Ideologi Perjuangan Soekarno*. Yogyakarta:Buana Pustaka.

#### 1.5.4 Marhaenisme

Marhaenisme merupakan sebuah ideologi perjuangan yang mengangkat masalah penghisapan dan penindasan rakyat kecil yang terdiri dari kaum tani miskin, petani kecil, buruh miskin, pedagang kecil dan kaum melarat Indonesia lainnya yang dilakukan oleh kapitalis, tuan tanah, rentenir dan golongan-golongan penghisap lainnya. Ungkapan yang paling terkenal dan sering dipakai oleh Sukarno adalah *exploitation de l'homme par l'homme* (penghisapan manusia oleh manusia). Marhaenisme telah dilahirkan dan dikembangkan antara tahun 1930-1933 merupakan pemikiran-pemikiran kiri yang mengambil beberapa saripati Marxisme. Dalam konteks sejarah, marhaenisme merupakan konstruksi pemikiran Sukarno yang dihasilkan dari sebuah perenungan yang sangat mendalam dan sebuah analisa berdasarkan historis materialisme terhadap perkembangan masyarakat yang hidup dalam wilayah geo politik (Hindia-Belanda). Berdasarkan analisa tersebut, didapat realitas sejarah bahwa rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat mendalam akibat sistem kapitalisme bangsa asing dan feodalisme bangsa sendiri.

Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan adalah bentuk penderitaan yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme/imperialisme/kolonialisme yang bersifat menindas rakyat Indonesia. Ketertindasan ini oleh Sukarno dicontohkan dalam realitas kehidupan yang dialami Pak Marhaen. Dia digambarkan sebagai seorang petani miskin dari daerah Cigalereng-Bandung yang kebetulan bertemu Sukarno saat bergerilya ke desa-desa. Dari obrolan antara Sukarno dan Pak Marhaen didapat keterangan bahwa meskipun Pak Marhaen memiliki sawah dan alat produksi sendiri namun hasil produksi pertaniannya ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan

hidup keluarganya, walaupun cukup itu hanya secara pas-pasan. Sukarno berfikir bahwa diperlukan sebuah landasan perjuangan bagi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari segala bentuk penindasan yang menyengsarakan rakyat. Landasan perjuangan tersebut oleh Sukarno dirumuskan dalam nama Marhaenisme<sup>11</sup>. Jadi marhaenisme dalam pemikiran Sukarno adalah sebagai ideologi perjuangan dan ideologi pembebasan.

Dari realitas sosial politik yang dilihat Sukarno tersebut maka tanpa melakukan perlawanan terhadap sistem kapitalisme, imperialisme, kolonialisme dan feodalisme maka tidak mungkin membebaskan anak manusia dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Dari uraian di atas jelaslah bahwa marhaenisme memiliki keperpihakan yang sangat besar terhadap kaum tertindas (marhaen). Marhaenisme adalah cermin dari jiwa dan cita-cita kehidupan rakyat Indonesia yang merdeka. Bahkan marhaenisme adalah cermin dari jiwa dan cita-cita kehidupan manusia. Sebab pada prinsipnya ajaran marhaenisme itu bersumber dari tuntutan budi dan nurani manusia (*the sosial conscience of man*) yaitu tuntutan atau keinginan untuk terciptanya harmonisasi antara kemerdekaan individu dan keadilan sosial. Begitu pula bagi rakyat Indonesia yang menginginkan kemerdekaan sebagai sebuah negara bangsa yang di dalam segalanya menyelamatkan kaum marhaen dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan.

---

<sup>11</sup> Cindy Adams. 2014. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*. (Yogyakarta : Media Pressindo). Hlm.75

Marhaenisme sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah ideologi karena telah memenuhi kaidah-kaidah ideologi yang disebutkan pada penjelasan konseptual mengenai ideologi. Marhaenisme merupakan gagasan yang lahir dari pemikiran Sukarno kemudian dianut dan diyakini sekelompok manusia yakni bangsa Indonesia. Gagasan mengenai marhaenisme merupakan intisari dari ideologi bangsa yakni Pancasila 1 Juni 1945. Dimana lima butir Pancasila sebagai dasar negara jika diperas kembali menjadi tiga butir dasar negara yakni Sosio-Nasionalisme yang mencakup butir kebangsaan dan internasionalisme, Sosio-Demokrasi yang mencakup butir musyawarah mufakat dan keadilan social serta Ketuhanan YME. Yang mencakup butir sila Ketuhanan. Lebih spesifik lagi tiga rumusan tersebut dapat diperas kedalam satu rumusan yakni Gotong Royong. Konsep tersebut merupakan konsep mengenai ideologi marhaenisme.

Marhaenisme juga dikatakan sebagai sebuah ideologi karena memiliki nilai, norma dan kepercayaan. Dimana nilai yang terkandung adalah apa yang diharapkan tentang masyarakat terbebas dari belenggu penindasan baik oleh bangsa asing maupun oleh bangsa sendiri. Norma sendiri terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan menjadi benteng masyarakat dalam bertindak agar cita-cita orang-orang yang memegang teguh marhaenisme tersebut dapat terealisasi. Kepercayaan dalam hal ideologi marhaenisme yakni menanamkan keyakinan dan kebenaran tentang perjuangan kelompok yang berpegang pada marhaenisme dapat mewujudkan cita-cita ideologi tersebut.

### 1.5.5 Ideologi Partai Politik

Ideologi partai politik merupakan payung organisasi partai politik secara keseluruhan termasuk perilaku-perilaku yang muncul didalamnya. Kekuatan ideologi suatu partai politik dapat juga diukur melalui kejelasan persepsi masyarakat akan nilai dan faham yang menjadi basis perjuangan partai politik yang bersangkutan. Ketika pemahaman masyarakat tinggi akan identitas dan basis perjuangan suatu partai politik, maka dapat dikatakan bahwa ideologi partai politik tersebut kuat. Namun apabila masyarakat hanya mampu melihat ideologi suatu partai politik dengan samar-samar dan bahkan bingung dalam mengidentifikasi maksud dan tujuan pendirian partai politik tersebut, maka ideologi partai politik tersebut dapat dikatakan lemah.

Mengingat partai politik merupakan sebuah organisasi maka ideologi partai politik menjadi baik dan kuat jika terdapat konsistensi yang tinggi dari segala elemen organisasi dalam menegakanya. Adapun elemen organisasi penyusun ideologi partai politik tersebut adalah visi dan misi partai, tujuan antara, strategi partai, struktur organisasi partai, budaya organisasi partai, kebijakan partai, kolektivitas ideologi politik, dari ideologi individu ke organisasi, dari sejarah pembentukan ke perkembangan, dari kebijakan internal ke eksternalisasi, materialisme ideologi politik, *platform* partai, isu politik dan kerangka acuan *problem solving*<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Firmanzah, Ph.D. 2018. *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di era Demokrasi*. (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia). Hlm. 111

Visi dan misi partai politik berkaitan dengan tujuan jangka Panjang serta memberikan gambaran tentang nilai dan faham serta landasan perjuangan partai politik terkait. Dalam hal ini, ideologi berkaitan dengan kondisi ideal masyarakat yang diinginkan. Adapun maksud dari tujuan antara adalah sebagai perantara atau tahapan-tahapan dalam mencapai tujuan jangka Panjang. Tujuan antara berguna dalam mengukur alur pencapaian tujuan partai politik, selain itu tujuan antara juga berfungsi dalam meninjau pencapaian tujuan partai politik apakah masih dalam jalur ideologisnya atau tidak. Sarana dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan partai politik adalah melalui strategi politik. Strategi tersebut dapat dibedakan dalam beberapa hal yaitu strategi partai politik dalam penggalangan dan mobilisasi massa untuk membentuk opini publik, strategi untuk berkoalisi dengan partai lain dan strategi partai politik dalam mengembangkan dan memberdayakan organisasi partai politik mulai dari penggalangan dana, pemberdayaan anggota, kaderisasi dan lain sebagainya.

Elemen dari ideologi partai politik berikutnya adalah struktur organisasi. Keterkaitan struktur organisasi dengan ideologi partai politik tercermin dalam cara pengelompokan tugas dan pekerjaan organisasi. Selanjutnya terdapat budaya organisasi, dimana didalamnya semua sistem nilai, kepercayaan dan kerangka berfikir tercermin dalam perilaku maupun sifat anggota dan pengurus partai politik. Adapun kebijakan partai politik merupakan cara partai politik dalam melihat, menganalisis dan mengajukan solusi atas permasalahan bangsa. Elemen penyusun ideologi partai politik selanjutnya adalah kolektivitas ideologi dimana ideologi partai politik dipandang secara holistik serta menjadi identitas organisasi dan

anggota partai secara keseluruhan. Untuk ideologi individu ke dalam ideologi suatu partai perlu terkait dan harus adanya sebuah sistem dan mekanisme yang menjamin kesesuaian tersebut. Ideologi partai dalam wujud materiil perlu juga disesuaikan dengan konteks ruang dan waktu, itulah yang dimaksud dengan dari sejarah pembentukan harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Dalam hal kebijakan internal ke eksternalisasi adalah berkaitan dengan usaha partai membawa ideologinya agar dapat dirasakan pula dampaknya oleh masyarakat luas bukan hanya anggota maupun kader partai yang bersangkutan.

Adapun elemen penyusun selanjutnya adalah materialisme ideologi, hal tersebut dipandang sebagai suatu upaya partai politik untuk menterjemahkan ideologi tersebut kedalam hal-hal yang bersifat riil dan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, mengingat ideologi politik biasanya masih bersifat abstrak dan konseptual. Elemen selanjutnya adalah *platform* partai politik yang berisikan komitmen partai politik dalam menjalankan roda organisasi serta berkaitan dengan apa yang ingin dikontribusikan untuk masyarakat. *Platform* partai politik tersebut berisikan hal-hal fundamental dan menjadi prioritas perjuangan politik. Dalam hal isu politik suatu partai maka berpijak pada permasalahan yang ada di masyarakat dan dalam hal ini kerangka acuan *problem solving* menjadi pijakan partai politik dalam memberikan program penyelesaian atas permasalahan yang ada. Cara partai politik dalam upaya pemecahan permasalahan-permasalahan yang ada ditengah masyarakat tidak akan terlepas dari unsur ideologi, karena ideologi memberikan petunjuk dan arah tentang cara yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut.



Elemen-elemen penyusun ideologi politik tersebut dapat ditinjau dari fungsi partai politik itu sendiri sebagai suatu organisasi. Adapun fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo adalah (1) sebagai sarana komunikasi politik (*instrument of political communication*), (2) sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*), (3) sebagai sarana rekrutmen politik (*instrument of political recruitment*) dan (4) sebagai sarana pengatur konflik (*instrument of conflict management*)<sup>13</sup>.

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1 Penerapan Marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah**

Ideologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu gagasan yang dianut oleh sekelompok orang yang terorganisir dalam wadah organisasi partai politik. Partai politik yang dimaksud adalah dalam cangkupan organisasi DPD PDI-P Jawa Tengah dimana ide atau gagasan mengenai ideologi menjadi nilai, norma dan kepercayaan yang dianut oleh setiap kader dan anggota dalam melaksanakan fungsi partai sebagai organisasi politik.

Marhaenisme dalam penelitian ini adalah terkait pemikiran Sukarno mengenai dasar perjuangan bagi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari segala bentuk penindasan yang menyengsarakan rakyat atau lebih spesifik menyengsarakan kaum marhaen Indonesia. Marhaenisme diadopsi menjadi dasar perjuangan PDI-P. Marhaenisme dalam dasar perjuangan PDI-P merupakan alat

---

<sup>13</sup> Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta : Gramedia Pustaka utama). Hlm.405

perjuangan dalam membentuk dan membangun karakter bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945, sebagai alat perjuangan guna melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai kaidah Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi dan keTuhanan YME. (Tri Sila) serta sebagai alat perjuangan yang menentang individualisme untuk menghidupkan dan menumbuhkan jiwa semangat Gotong Royong (Eka Sila).

Penelitian ini akan menganalisis penerapan marhaenisme dalam kerja organisasi partai politik di DPD PDI-P Jawa Tengah, dengan melihat penerapan konsep ideologi marhaenisme melalui fungsi partai politik yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo. Fungsi partai politik tersebut meliputi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik. Fenomena yang ingin diamati terkait konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi politik, diamati dari gejala:
  - a. Cara DPD PDI-P Jawa Tengah dalam mematerialisasikan aspirasi yang didapat
  - b. Cara DPD PDI-P Jawa Tengah dalam agregasi dan artikulasi kepentingan
2. Sosialisasi politik, diamati dari gejala:
  - a. Proses penyampaian nilai marhaenisme agar menjadi budaya organisasi di DPD PDI-P Jawa Tengah
  - b. Media yang digunakan DPD PDI-P Jawa Tengah dalam proses penyampaian nilai marhaenisme
  - c. Siklus kaderisasi yang ditempuh DPD PDI-P Jawa Tengah

3. Rekrutmen politik, diamati dari gejala:
  - a. Seleksi kepengurusan internal DPD PDI-P Jawa Tengah
  - b. Seleksi kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah dalam pengisian jabatan eksekutif dan legislatif di Jawa Tengah
  - c. Penjaringan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah
4. Sarana pengatur konflik, diamati dari gejala:
  - a. Proses identifikasi konflik internal maupun eksternal DPD PDI-P Jawa Tengah
  - b. Mekanisme penyelesaian konflik oleh DPD PDI-P Jawa Tengah

### **1.6.2 Orientasi Ideologi**

Orientasi merupakan pandangan yang mendasari pemikiran seseorang. Orientasi membentuk sistem berfikir orang terkait suatu hal. Penelitian ini akan melihat pemahaman kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Pemahaman tersebut ditinjau dari orientasi yang dimiliki kader dan anggota yang meliputi orientasi kognitif, orientasi afektif dan orientasi evaluatif.

Orientasi kognitif berkaitan dengan kesadaran serta pemahaman kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan, orientasi afektif berkaitan dengan perasaan serta sikap kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah terhadap marhaenisme sebagai dasar perjuangan, orientasi evaluatif berkaitan dengan penilaian serta tindakan kader dan anggota DPD PDI-P Jawa

Tengah terhadap marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Fenomena yang akan diamati terkait konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Orientasi kognitif, diamati dari gejala:
  - a. Pengetahuan kader dan anggota tentang simbol dan kepercayaan mendasar dalam ideologi partai
  - b. Pengetahuan kader dan anggota tentang ideologi, sistem politik yang bekerja, tokoh-tokoh politik yang memiliki peranan kuat, masalah-masalah politik dan kebijakan terkini
2. Orientasi afektif, diamati dari gejala:
  - a. Pelibatan perasaan mendalam kader dan anggota terhadap sistem politik, peranannya, dan aktor politiknya
  - b. Pemahaman kader dan anggota tentang alasan ideologis pengambilan keputusan
3. Orientasi evaluatif, diamati dari gejala:
  - a. Adanya kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan pada kader dan anggota
  - b. Pemahaman secara mendalam kader dan anggota tentang dasar perjuangan, tujuan, dan materialisasi dari ideologi yang dimiliki.

### **1.6.3 Hambatan Penerapan Marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah**

Identifikasi hambatan yang ada dalam penerapan marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah dengan melihat hambatan tersebut pada setiap elemen penyusun

ideologi partai politik sebagai suatu organisasi, untuk kemudian bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi baru terhadap penerapan marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah. Hambatan tersebut akan diamatai dari setiap fenomena mengenai elemen penyusun ideologi politik yang terdiri dari:

1. Visi dan misi
2. Tujuan antara
3. Strategi partai
4. Struktur organisasi
5. Budaya organisasi
6. Kebijakan partai
7. Kolektivitas ideologi politik
8. Ideologi individu ke organisasi
9. Sejarah pembentukan ke perkembangan
10. Kebijakan internal ke eksternalisasi
11. Materialisme ideologi politik
12. *Platform* partai
13. Isu politik
14. Kerangka acuan *problem solving*

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Desain Penelitian

Pada penelitian tentang Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme DPD PDI-P Provinsi Jawa Tengah ini, peneliti akan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai sebuah penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu fenomena/peristiwa secara sistematis dan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Sedangkan pemahaman deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode yang dijelaskan demikian diharapkan nantinya dapat membantu peneliti dalam mengkaji dan menganalisis data maupun temuan lainnya selama melakukan penelitian.

Penelitian ini disamping menggunakan tipe penelitian deskriptif juga akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk memahami (*tounderstand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dari pada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting yang harus dilakukan seperti mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus kepada tema

yang umum dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel<sup>14</sup>.

### **1.7.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian berkaitan dengan tempat, instansi maupun wilayah dimana penelitian dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan di DPD PDI-P Jawa Tengah. Situs penelitian tersebut dipilih guna memperoleh data yang menunjang terjawabnya rumusan masalah tentang kesesuaian kerja organisasi partai politik di DPD PDI-P Jawa Tengah dengan ideologi yang dianut, fungsi marhaenisme dan hambatan serta tantangan yang dihadapi DPD PDI-P Jawa Tengah yang mengukung marhaenisme dalam menjalankan organisasi partai.

### **1.7.3 Subjek Penelitian**

Dalam teknik penetapan informan penelitian menggunakan *purposive sampling* untuk menjadikan rujukan atau narasumber dalam penelitian ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Orang atau instansi terkait paling tahu tentang informasi serta data apa yang diharapkan pada penelitian ini.

---

<sup>14</sup> Creswell, J. W. (2013). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.4-5

2. Orang atau instansi tersebut sebagai penguasa sehingga nantinya akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Adapun informan yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah jajaran pengurus maupun anggota DPD PDI-P Jawa Tengah yang terdiri dari:

1. Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah
2. Pengurus DPD PDI-P Jawa Tengah yang merangkap anggota fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah
3. Anggota DPD PDI-P Jawa Tengah yang merangkap anggota fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah
4. Ketua Badan Pendidikan dan Pelatihan (BADIKLAT) DPD PDI-P Jawa Tengah

#### **1.7.4 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen resmi lainnya, catatan atau memo, dan tindakan-tindakan serta peristiwa-peristiwa dalam kaitannya dengan penelitian tentang Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme DPD PDI-P Provinsi Jawa Tengah.



### **1.7.5 Sumber Data**

#### **1. Data primer**

Data primer adalah data informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada informan yakni jajaran pengurus maupun anggota DPD PDI-P Jawa Tengah selaku subjek penelitian yang terdiri dari ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, pengurus DPD PDI-P Jawa Tengah yang merangkap anggota fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah, anggota DPD PDI-P Jawa Tengah yang merangkap anggota fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah dan ketua Badan Pendidikan dan Pelatihan (BADIKLAT) DPD PDI-P Jawa Tengah

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atau bahan informasi lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, baik dari buku, tinjauan pustaka, dokumen-dokumen, jurnal, buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan marhaenisme dalam PDI-P yang diperoleh dari jajaran pengurus maupun anggota DPD PDI-P Jawa Tengah serta informan lainnya yang menunjang penelitian ini.

### **1.7.6 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, peneliti akan menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan informasi yang jelas. Beberapa metode tersebut sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Menanyakan pertanyaan dengan format terbuka, mendengarkan dan merekamnya kemudian menindaklanjuti dengan pertanyaan tambahan yang terkait. Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan tatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Peneliti akan berhadapan dengan informan secara intens nantinya dalam mendapatkan informasi secara jelas tentang Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme DPD PDI-P Provinsi Jawa Tengah.

2. Telaah Dokumen

Telaah dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Telaah dokumen yang dimaksud bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang tentang kondisi masyarakat dan data yang diambil dari buku, artikel/tulisan ataupun data yang dapat diakses di internet serta literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Hal-hal yang terdapat dalam analisis data kualitatif merupakan data yang bersifat kata-kata bukan merupakan angka. Data dikumpulkan dengan beraneka ragam cara (wawancara dan dokumen) dan biasanya diolah sebelum siap dituangkan (proses pencatatan, transkrip, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis).

Data yang nantinya dianalisis adalah data hasil wawancara dan dokumentasi yang sifatnya kualitatif tentang Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme DPD PDI-P Provinsi Jawa Tengah. Analisis data kualitatif yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan linear dan hierarkis dari John W. Cresswell seperti dalam bukunya *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* terbitan Pustaka Pelajar, Yogyakarta yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan ataupun memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Membaca keseluruhan data

Langkah pertama ialah membangun gagasan umum atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Pada tahapan ini penulis akan menulis catatan-catatan khusus tentang data yang diperoleh.

3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data

*Coding* merupakan proses mengelola informasi/materi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum menyimpulkannya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap yaitu : mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mengelompokkan kata, paragraf ataupun gambar kedalam kategori-kategori.

4. Penerapan proses *coding*

Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan konsep, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Dalam tahapan ini peneliti akan menyampaikan informasi secara lebih detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam konsep tertentu terkait dengan topik penelitian. Tahapan ini akan menunjang strategi penelitian yang telah dirancang oleh peneliti.

5. Penyajian atau pelaporan kualitatif

Pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penyajian atau pelaporan penelitian kualitatif yakni dengan tipe deskriptif.

6. Triangulasi data

Triangulasi data dalam analisis data dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data hasil dari metode pengumpulan data (wawancara dan dokumen) yang dilakukan bersamaan dalam satu tahap penelitian. Kemudian triangulasi dilakukan terhadap *crosscheck* jawaban dari berbagai informan dan juga diperbandingkan fakta atau data yang diperoleh dari lapangan. Membandingkan data hasil dari metode-metode tersebut untuk mengetahui apakah ada hubungan/keterkaitan atau perbedaan-perbedaan. Triangulasi bertujuan untuk menyeimbangkan kekurangan-kekurangan dari satu metode dengan kelebihan-kelebihan dari metode lain.

7. Interpretasi data

Interpretasi yang akan dilakukan peneliti pada penelitian kualitatif tentang orientasi ideologi Marhaenisme PDI Perjuangan dikalangan pengurus maupun anggota DPD PDI-P Jawa Tengah ini berupa hasil penelitian

dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Dalam hal ini, peneliti menganalisis data dengan lebih mendalam dan detail melalui persandingan antara hasil temuan dilapangan dengan berbagai macam teori yang telah dijelaskan didalam kerangka teori dan kerangka konseptual. Dalam interpretasi data, peneliti menggunakan empat macam kriteria untuk memberikan validasi yang akurat terhadap data, empat criteria tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Credibility* (derajat kepercayaan)

Uji kredibilitas data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan fokus dalam pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman dengan menggunakan *membercheck* guna memberikan kesempatan pada partisipan apabila ingin merubah, menambah atau mengurangi jawaban saat wawancara berlangsung.

b. *Dependability* (kebergantungan)

Merupakan kestabilan data dari waktu ke waktu dan pada tiap kondisi. Salah satu teknik untuk mencapai *dependability* data adalah *inquiry audit*, yaitu peneliti meneliti kembali data-data yang mendukung validasi data. Data-data lain yang mendukung peneliti yaitu mengambil dari teori dan konsep sebelumnya.

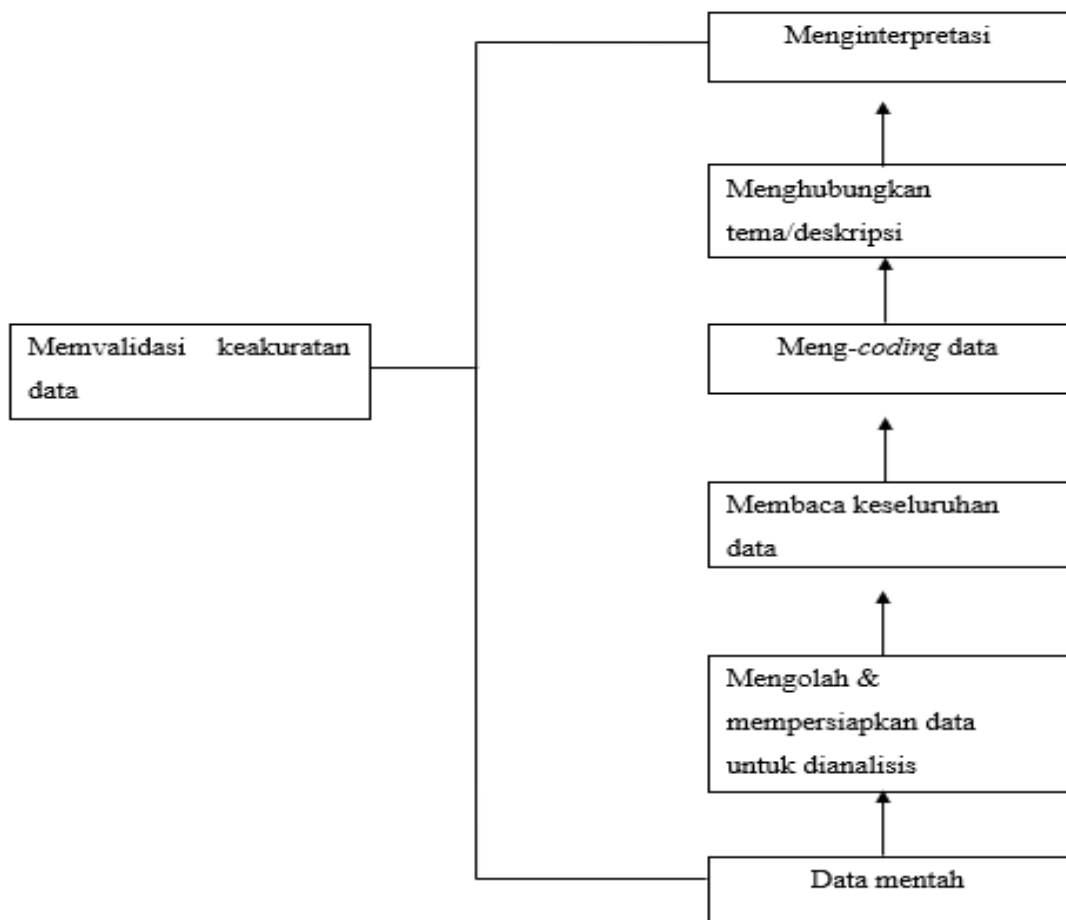
c. *Confirmability*(kepastian)

Merupakan objektivitas atau netralitas data, dimana data yang diperoleh merupakan hasil jawaban yang sama dari partisipan tentang relevansi data.

d. *Transferability* (keteralihan)

Maksudnya adalah bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi upaya materialisasi ideologi partai politik..

**Gambar 1.1**  
**Analisis Data Menurut John W. Cresswell**



### **1.7.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)**

Keabsahan data yang diperoleh saat melakukan pengumpulan data merupakan kunci utama dan merupakan faktor penentu dari sebuah penelitian, karena apabila sebuah data yang diperoleh diragukan keabsahannya maka penelitian tersebut menjadi tidak valid. Keabsahan data dapat diperoleh dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik untuk memeriksa keabsahan data untuk pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi teori yaitu penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang didapatkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini berbagai teori yang telah dijelaskan bertujuan untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data. Peneliti akan membandingkan hasil pengamatan langsung dengan teori yang berlainan dengan yang digunakan dalam penelitian ini sehingga akan menunjang kualitas data hasil penelitian.